

PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN KUALITAS PROFIL PELAJAR PANCASILA

THE GOVERNMENT'S ROLE IMPROVING THE QUALITY OF PANCASILA STUDENT PROFILE

Deviana Nur Azizah*, Dede Sri Kartini

Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

*Koresponden email: deviananurazizah73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak guna meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila di sekolah dasar pada 2021-2023. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya pengimbasan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan secara luas. Faktor penyebab yang menghambat keberlangsungan peran pemerintah dalam penerapan Program Sekolah Penggerak adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait pembelajaran paradigma baru, keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan keterampilan teknologi, kurangnya anggaran, mindset pendidik yang sulit berubah, serta sebagian kepala sekolah yang mendekati masa pensiun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori peran pemerintahan yang mencakup lima aspek: pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana. Data dikumpulkan melalui studi literatur, studi lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala Sekolah Penggerak, Fasilitator, serta Wali Murid. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menjalankan perannya melalui penyediaan informasi, penguatan sarana prasarana, pelatihan guru, supervisi rutin, pengalokasian dana, serta kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa, yang sejalan dengan tujuan Program Sekolah Penggerak dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Kata kunci: Program Sekolah Penggerak; Peran Pemerintah; Profil Pelajar Pancasila

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Tangerang City Government in implementing The "Sekolah Penggerak Program" to enhance the quality of the Pancasila Student Profile at the elementary school level during 2021–2023. The main issue identified is the suboptimal dissemination of Pancasila Student Profile values across the broader educational ecosystem. Several factors hinder the program's implementation, including a limited understanding of new learning paradigms, inadequate infrastructure, technological skill gaps, insufficient funding, educators' resistance to change, and some school principals nearing retirement. This research employs a descriptive qualitative method based on the theory of government roles, encompassing five aspects: public service, facilitation, mentoring, partnership, and funding. Data were collected through literature reviews, field studies, interviews, observations, and documentation, involving informants from the Tangerang City Education Office, "Sekolah Penggerak" Principals, Facilitators, and Parents. Data analysis followed three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Tangerang City Government has effectively carried out its role through information dissemination, infrastructure development, teacher training, routine supervision, funding allocation, and collaboration with communities and institutions. These efforts have positively impacted literacy, numeracy, and student character development, aligning with the program's goals to foster the Pancasila Student Profile.

Keywords: *The "Sekolah Penggerak" Program; Government Role; Pancasila Student Profile*

PENDAHULUAN

Komitmen atas terjaminnya hak warga negara akan pendidikan diimplementasikan hingga ke tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan peraturan ini telah membawa konsekuensi bahwa pendidikan sebagai salah satu bidang kewenangan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya pendidikan yang berkualitas di daerah.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan yang berkualitas harus menanamkan nilai moral, etika, dan keterampilan berpikir kritis agar peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Lingkungan belajar yang kondusif, kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang inovatif, serta kompetensi dan kinerja pengajar yang mumpuni menjadi elemen penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan karakter bangsa.

Hadirnya konsep Profil Pelajar Pancasila menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik berkarakter unggul dan memiliki keterampilan yang relevan di abad ke-21.

Profil Pelajar Pancasila merupakan perwujudan nyata dari komitmen negara dan pemerintah dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Profil Pelajar Pancasila dirancang guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cakap dan mumpuni menghadapi perubahan zaman. Terdapat enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yang dirancang untuk membentuk peserta didik yang unggul secara akademis dan memiliki karakter yang kuat dan berdaya saing di era global, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Dimensi bernalar kritis dan kreatif mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan *problem-solving* yang relevan dengan peningkatan literasi dan numerasi. Sementara itu, dimensi bergotong royong dan mandiri memperkuat sikap sosial dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter positif di lingkungan sekolah. Dengan mengaitkan setiap dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menguasai keterampilan dasar literasi dan numerasi sekaligus memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencetuskan sebuah terobosan baru dalam transformasi pendidikan di Indonesia berupa Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non kognitif (karakter). Kemampuan literasi dan numerasi menjadi aspek penting bagi peserta didik di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai landasan pengetahuan, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta sebagai bekal untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu, nilai karakter penting guna menciptakan kedekatan kepada Tuhan, membangun integritas dan moralitas pribadi sehingga dapat menghasilkan hubungan yang harmonis, serta menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak telah dilakukan sejak tahun 2021. Hingga tahun 2024, Kemendikbudristek berhasil membentuk 14.219 Sekolah Penggerak dalam tiga angkatan

pertama yang mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di 34 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Di Kota Tangerang, terdapat 26 Sekolah Dasar–15 Sekolah Negeri dan 11 Sekolah Swasta–dari dua angkatan pertama yang menjadi bagian dari Sekolah Penggerak.

Penerapan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang dapat dikategorikan baik dan berdampak langsung pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini dibuktikan dalam Hasil Capaian Rapor Pendidikan 2023 dengan sumber data Asesmen Nasional 2023 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Capaian Rapor Pendidikan 2024

Indikator	Jenjang	Hasil
Kemampuan Literasi	SD Umum	Baik (Naik dari tahun 2023)
	SD Kemenag	Baik (Naik dari tahun 2023)
	SD Kesetaraan	Baik (Naik dari tahun 2023)
Kemampuan Numerasi	SD Umum	Baik (Naik dari tahun 2023)
	SD Kemenag	Sedang (Naik dari tahun 2023)
	SD Kesetaraan	Sedang (Naik dari tahun 2023)
Karakter	SD Umum	Baik (Naik dari tahun 2023)
	SD Kemenag	Baik (Naik dari tahun 2023)
	SD Kesetaraan	Baik (Turun dari tahun 2023)

Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia Kota Tangerang 2024

Kategori hasil capaian dalam indikator literasi dan numerasi, yakni **Kategori Baik:** Lebih dari 70,00% murid mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. **Kategori Sedang:** 40,00% - 70,00% murid mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. **Kategori Kurang:** Kurang dari 40,00% murid mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Sementara itu, kategori hasil capaian dalam indikator karakter, yakni **Kategori Baik:** Sebagian besar murid sudah terbiasa dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. **Kategori Sedang:** Sebagian besar murid menyadari pentingnya nilai-nilai Profil

Pelajar Pancasila. **Kategori Kurang:** Hanya sebagian kecil murid yang menyadari pentingnya nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila.

Data di atas mengindikasikan bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, terbukti dari hasil capaian yang positif. Bahkan pada indikator numerasi dan karakter, SD Umum yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang menunjukkan hasil yang positif dibandingkan dengan SD Kesetaraan dan SD Kemenag. Meskipun indikator karakter SD Umum berada dalam kategori baik, tetapi masih ditemukan kasus perundungan di kalangan peserta didik Sekolah Dasar di luar sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak. Contohnya, kasus perundungan di SD Islam Al Barkah yang terjadi pada Agustus 2024 lalu menimpa peserta didik yang masih duduk di bangku kelas 4. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, khususnya dalam membentuk karakter peserta didik yang berperilaku positif, belum berjalan optimal. Padahal seharusnya melalui Program Sekolah Penggerak tidak hanya memberikan dampak pada sekolah yang menjadi sasaran program, tetapi juga menginspirasi dan memberi pengaruh positif pada ekosistem pendidikan secara lebih luas. Dengan demikian, Pemerintah Kota Tangerang senantiasa mengoptimalkan peran pemerintah guna memastikan tersedianya layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas. Adapun peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam menata pelaksanaan program-program pendidikan khususnya Program Sekolah Penggerak terbagi dalam lima aspek sebagai berikut:

Peran sebagai pelayan masyarakat dapat dilihat dari pemberian informasi terkait program-program pendidikan sebagai landasan masyarakat untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan turut mengimbau semua sekolah dasar untuk mengikuti Program Sekolah Penggerak. Sosialisasi program ini kepada orang tua agar terjadi kolaborasi guna mewujudkan Profil Pelajar Pancasila juga turut dilakukan.

Peran sebagai fasilitator direfleksikan melalui penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan aplikasi e-Raport Kurikulum Merdeka untuk jenjang sekolah dasar yang bertujuan untuk mempermudah orang tua dalam mengakses hasil nilai sekolah anak dan mempermudah guru dalam menginput data atau nilai peserta didik. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga memberikan bantuan fasilitas berupa buku siswa dan buku pedoman guru untuk pembelajaran paradigma baru, bantuan TIK, serta pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja yang dapat dialokasikan

untuk pembelian fasilitas digital. Namun sayangnya, sarana prasarana sebagai pendukung pembelajaran masih dinilai kurang memadai, terlihat dari jaringan internet yang lambat dan kurangnya perangkat komputer.

Peran sebagai pendamping dapat dilihat dari kegiatan bimbingan yang dilakukan secara komprehensif. Pemerintah Kota Tangerang telah memberikan pendampingan secara penuh kepada setiap sekolah yang melaksanakan program ini. Penguatan sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui komite pembelajaran hingga *in house training*.

Pendampingan lainnya terlihat dari adanya Lokakarya Wawasan Kebinekaan Global Program Sekolah Penggerak Angkatan 1, supervisi pada komite pembelajaran dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) secara rutin, *Workshop* Pengimbasan PSP Angkatan 1, dan sebagainya. Namun, masih terdapat guru-guru yang kurang memahami konsep kurikulum paradigma baru yang dikembangkan di Program Sekolah Penggerak lantaran memiliki pola pikir yang masih sulit untuk berubah. Terdapat pula guru yang kurang terampil dalam memanfaatkan informasi dan teknologi.

Peran sebagai mitra terlihat dari bentuk kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang kepada beberapa pihak, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPP-PTK), dan sebagainya dalam rangka memberikan pembinaan mengenai Program Sekolah Penggerak. Selain itu, masyarakat juga diikutsertakan sebagai mitra, yang terlihat dari keterlibatan orang tua ketika pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan memperbaiki pembuatan maket dan *stand*.

Namun, dalam perannya sebagai mitra, Pemerintah Kota Tangerang menghadapi permasalahan karena sebagian kepala sekolah yang telah mengikuti pembekalan Program Sekolah Penggerak akan segera memasuki masa pensiun sehingga dapat menghambat kesinambungan program. Sebagai mitra, pemerintah perlu memastikan kesinambungan dan kelancaran program, termasuk memastikan bahwa kepala sekolah yang telah mengikuti pembekalan Program Sekolah Penggerak tidak segera memasuki masa pensiun sebelum program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Sebab, akan mengganggu kelangsungan program akibat kurangnya transfer pengetahuan dan kepemimpinan berkelanjutan.

Peran sebagai penyandang dana dapat dilihat dari adanya anggaran yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan. Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk

insentif dan honorarium serta memberikan diklat dan pelatihan guna mendukung peningkatan kualitas dan kreativitas guru. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 370.828.694.265 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk jenjang PAUD sampai SMP.

Efektivitas program ini di Kota Tangerang belum maksimal akibat sejumlah permasalahan—seperti yang tertulis pada bagian peran sebagai fasilitator, mitra, pendamping, dan penyandang dana—yang menjadi faktor penyebab ketidaksempurnaan Program Sekolah Penggerak. Hal ini menjadi penghambat dan perhatian bagi Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas Profil Pelajar Pancasila di tingkat sekolah dasar.

Studi-studi mengenai peran pemerintah telah banyak dilakukan. Namun, belum ada studi yang membahas secara komprehensif mengenai peran pemerintah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan melihat aspek peran sebagai pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana. Studi ini diharapkan mampu memaparkan dinamika peran pemerintah dalam proses penyelenggaraan program tersebut di Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, dan kelas peristiwa pada masa sekarang berdasarkan pengamatan, wawancara, dan analisis konten, bukan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai sejauh mana pelaksanaan peran Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak guna meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan studi literatur, studi lapangan dan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Untuk penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *accidental* yang mencakup Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala Sekolah Penggerak, Fasilitator Sekolah Penggerak, dan Wali Murid Sekolah Penggerak. Sementara untuk analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk memperkuat penelitian ini, teori yang digunakan adalah Peran Pemerintahan dari Sihom-

bing (2001) yang mencakup lima aspek, yaitu Peran sebagai Pelayan Masyarakat, Peran sebagai Fasilitator, Peran sebagai Pendamping, Peran sebagai Mitra, dan Peran sebagai Penyandang Dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayan Masyarakat

Pemerintah memiliki kewajiban utama untuk melayani masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan telah berupaya menjalankan tanggung jawab tersebut dengan menyediakan berbagai layanan pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui Program Sekolah Penggerak. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung program ini. Layanan tersebut meliputi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan infografis yang memperjelas tujuan serta pelaksanaan program. Selain itu, dilakukan advokasi dan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat, serta pengimbasan praktik dari Sekolah Penggerak ke sekolah lain yang nilai rapor pendidikannya masih rendah. Proses ini memastikan bahwa dampak positif program dapat dirasakan lebih luas.

Layanan untuk pemenuhan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama. Kendala infrastruktur yang tidak memadai sering kali dilaporkan melalui SIMPKB dan dikoordinasikan hingga tingkat pusat untuk penyelesaian. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama BPMP dan pihak terkait. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, baik oleh pengawas maupun oleh dinas setiap tiga bulan atau semester, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan layanan di masa mendatang.

Berdasarkan upaya dan layanan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah berperan sebagai pelayan masyarakat yang cepat dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Layanan yang diberikan meliputi penyediaan informasi, pengimbasan, dan evaluasi. Informasi yang jelas dan terstruktur ini memastikan setiap pihak yang terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga masyarakat dapat memahami perannya masing-masing. Pemahaman yang baik memungkinkan para *stakeholder* akan

mendukung pembelajaran yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Informasi yang memadai juga membantu menciptakan keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan.

Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas menyediakan fasilitas, mendukung komunikasi, serta mendorong partisipasi dan aspirasi masyarakat. Peran ini diwujudkan dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang di mana Dinas Pendidikan mengambil peran sentral untuk memberikan dukungan yang optimal melalui penyediaan sarana dan prasarana. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan penelitian ini, Helmiati selaku Kepala Bidang Pembinaan SD/MI Dinas Pendidikan Kota Tangerang, bahwa dukungan yang diberikan mencakup fasilitas infrastruktur, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, serta pendanaan khusus untuk mendukung kebutuhan program. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan sekaligus meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila.

Untuk memahami kebutuhan spesifik setiap sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tangerang melakukan asesmen bersama pihak sekolah. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing sekolah, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan selaku Fasilitator Program Sekolah Penggerak, Diah Alfianingtiass. Pendekatan ini dilakukan secara egaliter dengan memposisikan fasilitator sebagai mitra sejajar sehingga menciptakan hubungan yang lebih kooperatif antara fasilitator dan kepala sekolah. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun strategi pemenuhan kebutuhan, seperti pelatihan kompetensi dan pengadaan alat pembelajaran.

Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan menjadi salah satu fokus utama dalam hal fasilitator ini. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, Zainal Arifin selaku Kepala Sekolah SD Daarul Qur'an Internasional, bahwa pelatihan yang diikuti oleh tenaga pengajar memberikan dampak positif dalam implementasi program. Selain itu, kreativitas guru juga menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti memanfaatkan sumber daya lokal untuk mengajarkan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini meningkatkan kreativitas peserta didik dan mendukung pengembangan kualitas Profil Pelajar Pancasila.

Di sisi lain, bentuk penghargaan dan apresiasi berupa pemberian sertifikat kepada sekolah yang berpartisipasi dalam Program Sekolah Penggerak angkatan pertama juga dilakukan. Langkah ini menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus me-

ningkatkan partisipasi dalam program. Lebih jauh, Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga berupaya mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi yang menarik dan melibatkan narasumber yang dikenal untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif.

Berdasarkan berbagai bentuk dukungan dan asesmen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator telah dilaksanakan dengan baik yang terbukti dari pemenuhan sarana dan prasarana, pelatihan tenaga pendidik, dan pemberian dukungan. Penguatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi fondasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik untuk mengakses metode pembelajaran inovatif. Dengan sarana yang memadai, peserta didik dapat lebih aktif dalam belajar, mengasah kreativitas, dan mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Hal ini turut mendukung dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti bernalar kritis, kreatif, dan mandiri.

Pendamping

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menjelaskan bahwa pengawasan pendidikan dilakukan secara berkala melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pemberian pendampingan. Dalam konteks ini, pendampingan yang dilakukan pemerintah diharapkan memberikan umpan balik berkelanjutan guna memastikan efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang melibatkan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana pendampingan. Helmiati selaku Kepala Bidang Pembinaan SD/MI Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyampaikan bahwa pendampingan utama pada tahun pertama hingga ketiga dilakukan oleh Kementerian, sementara Dinas Pendidikan Kota Tangerang bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan dukungan tambahan, seperti alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas pendukung.

Bentuk pendampingan ini mencakup kegiatan fasilitasi, supervisi, dan lokakarya, seperti yang diungkapkan oleh Diah Alfianingtiass, Fasilitator Sekolah Penggerak, bahwa fasilitator berperan sebagai konsultan sekolah dalam menerapkan kurikulum baru. Selain itu, fasilitator juga mengorganisasi kunjungan lapangan dan forum pemangku kepentingan untuk mendorong kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, pengawas sekolah, dan pihak sekolah.



Gambar 1. Lokakarya Wawasan Kebinekaan Global Program Sekolah Penggerak Angkatan ke-1 Kota Tangerang

Strategi pendampingan diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan evaluasi reguler, lokakarya, dan diskusi intensif. Sopiah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cipondoh 4, mengungkapkan bahwa lokakarya dan kunjungan lapangan menjadi sarana penting untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh sekolah. Lokakarya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu, PMO (*Project Management Office*) dan *coaching* rutin menjadi bagian dari mekanisme evaluasi pendampingan. Wawat Tursiawati, Kepala Sekolah SD Negeri Sukasari 5, menyebutkan bahwa evaluasi PMO dilakukan secara daring dan tatap muka untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan temuan ini, pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dalam Program Sekolah Penggerak menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pendamping telah diimplementasikan dengan baik. Melalui pendampingan akan membantu sekolah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, memberikan solusi yang tepat dan cepat, serta memastikan bahwa tujuan utama Program Sekolah Penggerak di mana mewujudkan Profil Pelajar Pancasila tetap tercapai. Pendekatan kolaboratif dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sehingga tujuan utama meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila dapat tercapai secara optimal.

Mitra

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kota Tangerang mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Tan-

gerang menempatkan dirinya sebagai mitra strategis yang berperan untuk mendukung, mendengar, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai mitra, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat sejajar di mana masyarakat turut memainkan peran penting dalam mendukung, mengawasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menghindari sikap dominasi pemerintah serta mendorong partisipasi aktif dan kreativitas masyarakat.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang, melalui peran mitranya, berkomitmen menjalin hubungan kolaboratif dengan sekolah-sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak. Helmiati selaku Kepala Bidang Pembinaan SD/MI menegaskan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program. Pendekatan ini diterapkan melalui posisi Dinas sebagai "rekan kerja" bagi sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Diah Alfianingtiass, Fasilitator Sekolah Penggerak, yang menempatkan dirinya sebagai pelatih (*coach*) agar sekolah merasa nyaman dalam menyampaikan tantangan dan kemajuan mereka.

Kolaborasi yang dijalin oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan sekolah mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan untuk guru dan orang tua, pertemuan rutin untuk membahas tantangan dan merencanakan langkah strategis, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan penerapan Kurikulum Merdeka yang melibatkan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Misalnya, SD Negeri Cipondoh 4 melibatkan berbagai instansi dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) seperti bekerja sama dengan Polres untuk memberikan edukasi terkait bahaya perundungan dan narkoba. Pendekatan serupa juga diterapkan di SD Daarul Qur'an Internasional melalui kegiatan wirausaha yang melibatkan peserta didik, orang tua, dan pihak eksternal untuk mengembangkan keterampilan praktis serta penguatan Profil Pelajar Pancasila.



Gambar 2. Kegiatan Wirausaha Market Day di SD Negeri Sukasari 5

Pemerintah memfasilitasi kolaborasi di tingkat sekolah dan tetap melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang mengundang partisipasi wali murid, seperti survei, forum diskusi, dan polling untuk mendapatkan masukan terkait program sekolah. Misalnya, Wali Murid di SD Negeri Cipondoh 4 dan SD Daarul Qur'an Internasional aktif dilibatkan dalam kegiatan seperti *field trip* dan perencanaan P5. Masukan dari wali murid diterima melalui komite sekolah untuk selanjutnya disaring dan diintegrasikan dalam program sekolah.

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai mitra dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik karena mendapatkan pengalaman secara langsung. Kolaborasi yang melibatkan sekolah, lembaga eksternal, dan masyarakat akan mendorong keberhasilan program guna mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Penyandang Dana

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tangerang, bertindak sebagai penyedia dana untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, bantuan finansial kepada sekolah, serta insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan berasal dari APBD dan APBN. Bahkan, bagi sekolah-sekolah penggerak memperoleh tambahan dana dari BOS Kinerja. Pendanaan ini diarahkan untuk mendukung berbagai aspek, seperti pengadaan buku pembelajaran, fasilitas sanitasi, akses teknologi pendidikan, perangkat TIK, pengimbasan, pertemuan terkait program, serta perangkat ajar. Sebagai contoh, SD Negeri Sukasari 5 menerima pengadaan 15 unit Chromebook untuk mendukung digitalisasi pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Wawat Tursiawati, kepala sekolah setempat. Untuk pengelolaan dana telah diatur berdasarkan pedoman Kemendikbudristek untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan menghindari penyelewengan.

Dinas Pendidikan juga memberikan honorarium kepada fasilitator yang terlibat dalam lokakarya atau pelatihan terkait program ini. Diah Alfianingtiass, Fasilitator Sekolah Penggerak, mengungkapkan bahwa pendanaan ini mencakup pembayaran per sesi pelatihan yang dilakukan. Sejalan dengan pernyataan Helmiati bahwa Dinas Pendidikan turut menyediakan anggaran tambahan untuk pendampingan setelah berakhirnya dukungan dari Kementerian. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan ini melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan sarana pra-

sarana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai kontribusi semua pihak.

Bantuan pendanaan pun dinilai sangat membantu pihak sekolah. Zainal Arifin, Kepala Sekolah SD Daarul Qur'an Internasional, menyatakan bahwa dana yang disediakan cukup memadai untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti fasilitas pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengembangan guru. Dana tambahan dari sekolah berbasis swasta turut melengkapi pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Hal serupa diungkapkan oleh Sopiah, Kepala Sekolah SD Negeri Cipondoh 4, bahwa penggunaan dana telah dimaksimalkan sesuai kebutuhan program.

Selain kelancaran pencairan dana, transparansi pengelolaan anggaran menjadi keunggulan program ini. Proses pencairan dana, seperti yang dijelaskan oleh Wawat Tursiawati, dilakukan melalui sistem Internet Bank Corporate, yang memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Di sisi lain, manfaat pendanaan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Novia, Wali Murid di SD Negeri Sukasari 5, menegaskan bahwa wali murid tidak pernah diminta kontribusi dana tambahan karena semua kebutuhan program telah dicukupi oleh anggaran pemerintah.

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai penyandang dana dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan optimal. Dana yang memadai dapat membantu sekolah untuk mengakses fasilitas yang mendukung pembelajaran. Dukungan finansial dari pemerintah pusat dan daerah, panduan pengelolaan yang jelas, serta transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor utama keberhasilan implementasi program ini di Kota Tangerang. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah penggerak.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah menjalankan perannya dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dengan baik melalui lima fungsi utama, yaitu pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah memastikan optimalisasi layanan informasi, sosialisasi, dan evaluasi program. Sebagai fasilitator, pemerintah mendukung sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan. Peran pendamping diwujudkan melalui supervisi, bimbingan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Sebagai mitra, pemerintah mendorong ruang kolaborasi dan pengambilan keputusan partisipatif antara sekolah, masyarakat, dan instansi eksternal. Sebagai penyandang dana, pemerintah menyediakan penda-

naan yang memadai dan transparan untuk menunjang berbagai aspek program. Dengan demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila. Setiap elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan generasi pelajar yang unggul secara akademis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aditya, Y., Idris, A., & As, A. (2019). Peran Dinas Pendidikan dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 507–518.
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 197–205. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>
- Astiti, K. A., Indrawan, P. A., & Bali, E. N. (2022). Empowering SDM Sekolah Penggerak Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. *Journal of Social Empowerment*, 3(7), 111–118. <https://doi.org/10.21137/jse.2022.7.2.4>
- Budiman, J., Irfan, M., & Malino, T. M. M. (2022). Implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) Tahun 2021 di SDN 23 Menyumbang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHAUSA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(2), 87–104. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v8i2.1581>
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Garis Khatulistiwa.
- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Indra, M., Yuhanidah, H., Putri, A. N., Arifatunissa, M., Padli, H., Khasanah, U., Rakhman, F., Kurniawan, Y. J., Isnaini, M., Harahap, T. K., Trisnawati, S. N. I., & Hermawan, S. (2021). *Merdeka Belajar Melalui Sekolah Penggerak*. Tahta Media Group.
- Khofifah, B., & Syaifudin, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Penggerak. *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 3(8), 7405–7410.
- Kuncoro, M. (2021). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nursyamsudin, & Jaelani, M. N. G. (2021). *Penguatan Literasi dan Numerasi*. Direktorat Sekolah Menengah Atas.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237> ISSN
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. Zanafa Publishing.
- Ridha, A. (2016). Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan). *El-Rusdy*, 1(2), 127–148.
- Sakdiyah, H., Rahimi, A., Darlis, A., Ammar, S. A., & Daulay, D. A. (2023). Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 692–697.
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., Falimu, & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Sari, E. (2019). *Manajemen Lingkungan Pendidikan: Implementasi Teori Manajemen Pendidikan pada Pengelolaan Lingkungan Sekolah Berkelanjutan*. Uwais Press.
- Satria, M. R., Adiprima, P., Jeanindya, M., Anggraena, Y., Anitawati, Kandi, S., & Tracey, Y. H. (2024). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sihombing, U. (2001). Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat. In F. Jalal & D. Supriadi (Eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (pp. 190–192). Adicita Karya Nusa.
- Syafiie, I. K. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama.
- Syafi'i, F. F. (2021). Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR "Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,"* 39–49.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Zuchron, D. (2021). *Tunas Pancasila 2021*. Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.